



Media: Merapi

Hari: Jumat

Tanggal: 20 April 2018

Halaman: 4

APEKSI BERI REKOMENDASI KEMENDAGRI

Kota Butuh Anggaran Seperti Dana Desa

DANUREJAN (MERAPI) - Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia menyatakan kota juga membutuhkan tambahan anggaran seperti dana desa yang sekarang dinikmati desa di seluruh Indonesia untuk mendukung peningkatan pelayanan ke masyarakat.

"Kota juga membutuhkan dana seperti dana desa karena masalah bukan hanya ada di kabupaten tetapi juga ada di kota," kata Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Airin Rachmi Diany pada pembukaan Rapat Kerja Komissariat Wilayah III Apeksi di Hotel Melia Puri Yogyakart, Kamis (19/4).

Menurut dia, permohonan anggaran tersebut sudah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian terkait berkomitmen untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan mengenai formulasi dana kelurahan yang akan diberikan kepada pemerintah kota.

Permohonan tersebut disampaikan saat evaluasi pemberian dana alokasi khusus (DAK) untuk mendorong perbaikan penyusunan DAK 2019. "Mudah-mudahan, bisa segera direalisasikan Rp 100 miliar per kota sehingga dana bisa digunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan dan meningkatkan pelayanan ke masyarakat," katanya.

Selain dana desa, Apeksi juga menyoroti banyaknya keluhan dari walikota terkait pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara khususnya tentang jabatan karena membutuhkan waktu lama dan biaya yang cukup besar.

"Keluhan banyak berasal dari luar Jawa. Prosesnya dinilai memakan waktu lama meskipun komunikasi atau koordinasi dengan pusat bisa dilakukan melalui elektronik namun tetap bisa menghambat birokrasi," ujarnya. Karena itu, ia berharap proses tersebut bisa dijalankan dengan lebih sederhana.

Sementara itu, Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti yang bertindak sebagai tuan rumah penyelenggaraan rapat kerja Komwil III Apeksi mengatakan, seluruh pemerintah kota dapat saling mendukung dan menguatkan untuk meraih tujuan yang selama ini sulit diperoleh jika diperjuangkan sendiri-sendiri.

"Rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan akan dibawa ke rapat kerja tingkat nasional yang rencananya digelar di Tarakan pada Juli. Harapannya, apa yang diperjuangkan bersama-sama ini bisa tercapai," kata Haryadi.

Gubernur DIY Sri Sultan HB X yang membuka rapat kerja tersebut mengingatkan seluruh pemerintah kota agar pembangunan yang dilaksanakan ada

Instansi
ag. P3ADK

Netral
Segera
Untuk diketahui

Gubernur DIY Sri Sultan HB X bersama Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti dan Ketua Apeksi Airin Rachmi Diany membuka raker APEKSI Komwil III di Yogyakarta.

lah pembangunan yang memusnakan manusia dan bukan sekadar mengejar pencapaian fisik.

"Jangan sampai, rakyat menjadi asing melihat perkembangan atau pembangunan yang dilakukan di kota tempat mereka tinggal. Harus ada perencanaan yang baik dengan melibatkan masyarakat. Ada dialog dengan rakyat," katanya.

Menurut Sultan HB X, keberadaan ruang-ruang publik di kota harus diseimbangkan dengan laju pembangunan sebagai wadah untuk mengekspresikan sebuah kota yang berperadaban dan mengembalikan karakter kota yang manusiawi.

(Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Perekonomian Pengemb. P	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005